

HMI Di Arena Konferensi Nasional (Konas) V

Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil

Batam, 29 Agustus – 1 September 2006

Suwardi)*

- Direktur Eksekutif (Ketua Umum) Bakornas LTMI-HMI

- Salah seorang Pemakalah Konas V



Acara Konferensi Nasional yang telah dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau untuk kelima kalinya setelah sebelumnya yang ke empat di Balikpapan tahun 2004 adalah agenda dua tahunan dalam rangka mempertemukan para stakeholders (pemerintah/pengambil kebijakan, pengusaha, pemerhati pesisir dan laut, pakar, mahasiswa dan masyarakat) yang terkait dan konsen dengan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Kegiatan ini dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numbery, yang juga dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup, Rahmat Witar, Gubernur Kepulauan Riau dan Pejabat Daerah lainnya. Acara KONAS V kali ini mengusung tema “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Lautan Untuk Mengangkat Marwah Negeri”, hasil kerjasama Departemen Kelautan dan Perikanan, Pemprop Kepulauan Riau, Pemkot Batam, Universitas Riau, Batam Industrial Development Authority, Kadin Kota Batam dan Yayasan Pendidikan Maritim Indonesia.

Kegiatan dihadiri lebih dari 500 orang peserta, dimana peserta khusus pemakalah mencapai 75 karya. Isu yang diangkat dalam Konferensi terbagi dalam tiga kelompok, termasuk dalam penentuan makalah, yaitu :

- Optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil Untuk Pengentasan Kemiskinan dan Kebodohan.
- Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil Yang Berkelanjutan.
- Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil serta Upaya Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil.

Dari sekian banyak pemakalah dan peserta, yang patut diberi perhatian adalah keterlibatan dari Lembaga Kepemudaan (semacam KNPI, HMI ataupun OKP lainnya) tidak tersentuh. Padahal selain pemikiran-pemikiran ilmiah dari hasil penelitian kampus dan paparan kebijakan pemerintah, diperlukan juga berbagai studi kebijakan dan kritikan konstruktif dari elemen-elemen pemuda ini. Dan “keberanian” HMI hadir disana, yang merupakan peserta pemakalah satunya dari OKP, membuktikan bahwa sumber daya kader HMI merata dan cukup signifikan di bidang profesionalitas dan keilmuan. Dan arena Konferensi inilah dipandang sangat penting bagi kontribusi pemikiran lembaga dalam isu kelautan dan pesisir. Dan sedikit banyak Bakornas LTMI-HMI telah memecah kebuntuan pemikiran tersebut dan memberikan banyak dorongan dan masukan bagi perumusan Rekomendasi Konferensi. Dari Bakornas LTMI-HMI sendiri, yang diwakilkan langsung oleh Direktur Eksekutif (Ketua Umum), Suwardi, yang merupakan alumni Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, memaparkan makalah tentang “Urgensi Mitigasi Bencana dalam Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR)”.

Secara khusus makalah LTMI-HMI ini memberikan critical review terhadap RUUPR. HMI (dan LTMI) memandang bahwa Rencana Panataan Ruang sebagai suatu kebijakan politik di tingkat nasional, propinsi dan kabupaten harus merupakan suatu sistem dan sub sistem yang dapat mewujudkan sistem Panataan Ruang Nasional yang menjamin aspek keterpaduan, keberlanjutan dan keadilan yang merupakan roh dari Undang-Undang Penataan Ruang. Faktor geopolitik nasional, geoekonomi lokal dan regional, geostrategis wilayah perairan-kepulauan dan perbatasan serta kerentanan geologis struktur bumi dan kerawanan bencana (termasuk bencana pesisir, pantai dan pulau-pulau) harus menjadi semangat dalam proses penyusunan Undang-Undang Penataan Ruang. Beberapa masukan terhadap draft RUUPR tersebut adalah bahwa pertimbangan mitigasi bencana hanya sebagai pelengkap/komplementer, belum sebagai suatu hal yang penting, primer dan ruh bagi pola pemanfaatan ruang. Sehingga dalam salah satu pasal misalnya; **“pola pemanfaatan ruang didasarkan pada pertimbangan dan perhatian**

lingkungan alam dan buatan, ekonomi, sosial budaya, hukum serta pertahanan dan keamanan sebagai suatu kesatuan” (pasal 5), harus mencantumkan **kerawanan/mitigasi bencana** dalam rangkaian kalimat pasal tersebut.

Pemikiran-pemikiran seertilah yang dirasakan peserta konferensi masih miskin pembahasan dan pengayakan, sehingga kontribusi makalah HMI dan terobosan-terobosan pemikiran yang sampiakan pemakalah LTMI menjadi sangat penting bagi penyusunan draft akhir Rekomendasi.

Rekomendasi Konferensi tersebut diantaranya adalah:

- 1) Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil harus memperhatikan sosio culture setempat dan melibatkan semua stakeholders.
- 2) Upaya Mitigasi Bencana agar menjadi bagian penting dari Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Lautan dan Pesisir
- 3) Pemberdayaan bagi Pulau-pulau perbatasan dan terluar dalam mendukung keutuhan dan kewibawaan NKRI.
- 4) Dukungan bagi dipercepatnya pembahasan dan pengesahan RUU Pengelolaan Wilayah Lautan dan Pesisir sebagai payung hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil

Dalam agenda konferensi ini juga berhasil ditandatangani MoU 7 (tujuh) Kadin dari 7 anggota Forum Propinsi Kepulauan Indonesia dalam rangka pengembangan dan pengelolaan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan. Di akhir konferensi juga telah disepakati bahwa untuk Konferensi Nasional ke 6 tahun 2008 ditetapkan sebagai tuan rumah adalah kota Manado, Sulawesi Utara.